



TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I 2017



LATAR BELAKANG

1. Informasi yang dimiliki oleh penegak hukum terkait dengan penindakan kasus korupsi tidak transparan, terutama di Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Jumlah data yang dilaporkan oleh penegak hukum hanya jumlah kasus secara statistic dan tidak ada detil dari setiap kasus korupsi yang ditangani.

● TUJUAN

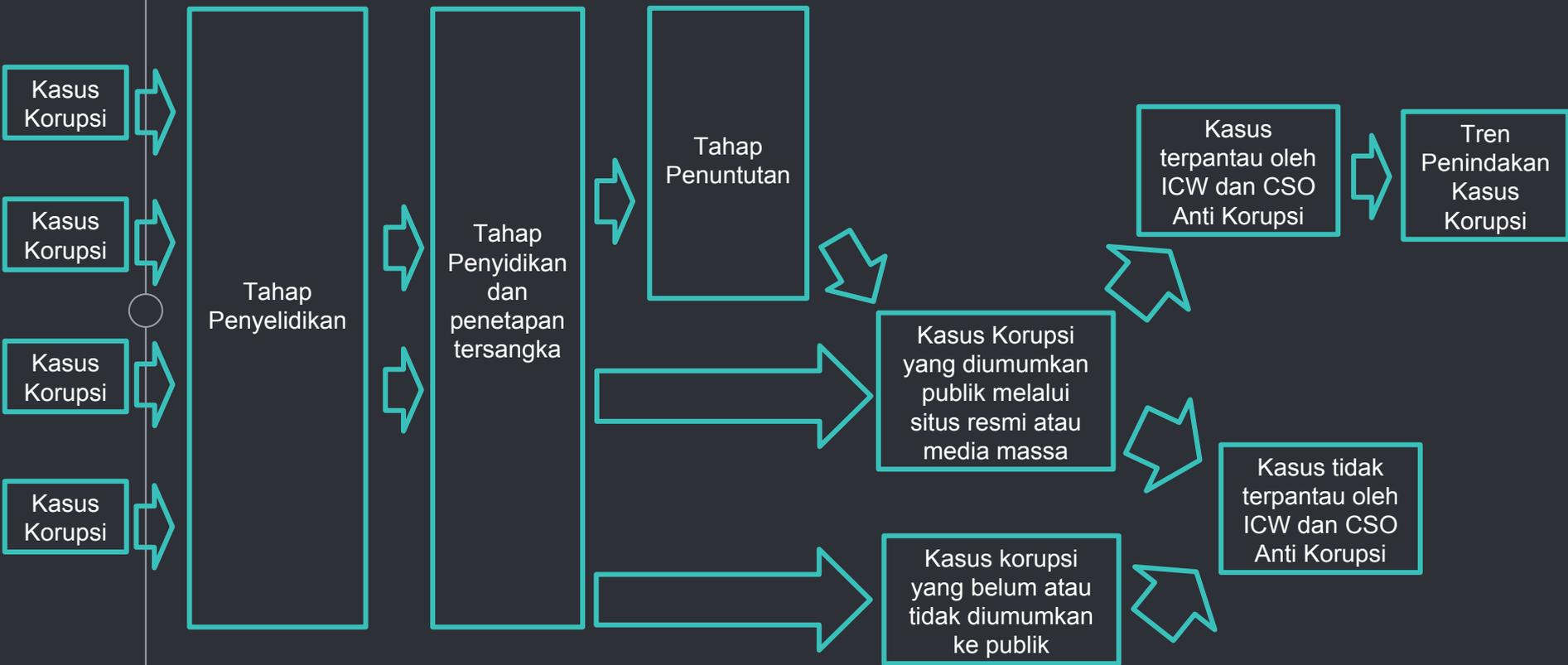
- Melakukan pemetaan atas kasus korupsi yang disidik oleh Aparat Penegak Hukum pada semester I 2017, meliputi : jumlah kasus korupsi, total nilai kerugian negara, jumlah tersangka, modus yang dilakukan, sektor korupsi terjadi, jabatan pelaku.
- Mendorong transparansi data kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum.



METODOLOGI

1. Melakukan pemantauan kasus korupsi di tingkat penyidikan yang sudah ada penetapan tersangka.
2. Pengumpulan data kasus korupsi yang telah diungkap ke publik oleh penegak hukum, baik melalui website resmi atau melalui media massa.
3. Melakukan tabulasi atas kasus – kasus yang terungkap ke publik dan terpantau oleh ICW.
4. Membandingkan statistik jumlah kasus dan kerugian negara serta penyuaipan berdasarkan semester.
5. Melakukan analisis deskriptif atas kinerja penyidikan kasus korupsi.

BAGAN DATA KASUS KORUPSI TAHUN 2016 YANG TERPANTAU OLEH ICW





TEMUAN



KINERJA PENYELIDIKAN APH SELAMA SEMESTER I 2017 (PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN)

Jumlah Kasus Korupsi

266 Kasus korupsi

Jumlah Tersangka

587 Tersangka Kasus Korupsi

Nilai Kerugian Negara

Rp 1,8 Triliun

Nilai Suap

Rp 118,1 Miliar

JUMLAH KASUS YANG ADA PENETAPAN TERSANGKA BARU OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

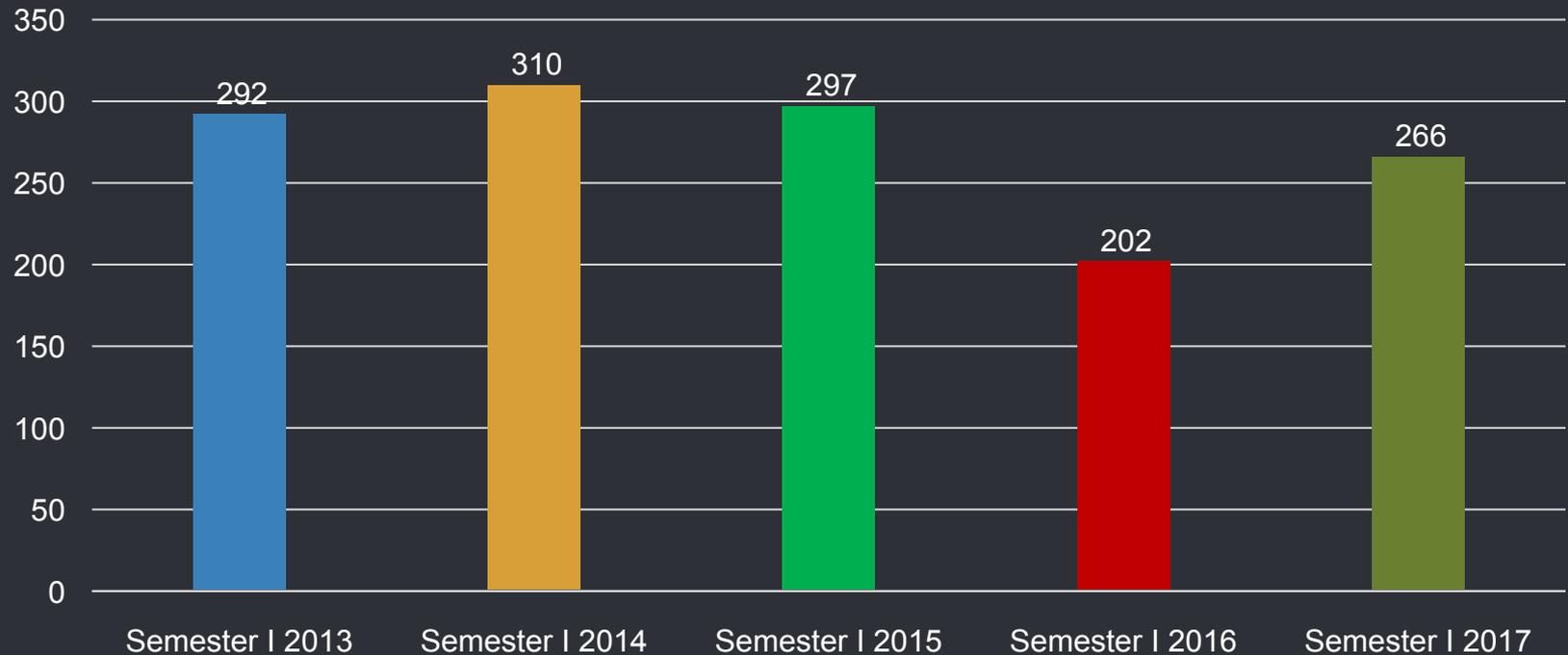
Jumlah Kasus Korupsi

19 Kasus korupsi

Lima Daftar Kasus Penetapan TSK Baru

- Kasus dugaan korupsi proyek E-KTP
- Kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran
- Kasus dugaan suap proyek jalan di Kementerian PUPR
- Kasus dugaan korupsi Sosialisasi Asian Games
- Kasus dugaan pengurusan sengketa Pilkada

PERBANDINGAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I 2013-SEMESTER I 2017



- Rata-rata kasus korupsi yang ditangani setiap semester I yakni sebanyak 228 kasus.
- Terjadi sedikit penurunan penanganan tindak pidana korupsi jika dilihat berdasarkan tren korupsi semester I mulai dari tahun 2013-2017.

KASUS KORUPSI SEMESTER I 2017 BERDASARKA N MODUS

- Pungutan liar menjadi modus yang sering dilakukan pada semester I 2017.
- Semenjak adanya Tim Saber Pungli, penindakan terhadap petty corruption meningkat.
- Penyalahgunaan anggaran masih menjadi modus kedua yang sering dilakukan.
- Sekitar 58 persen kasus bermodus pungutan liar masih belum diproses di tahap pengadilan.

Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap
Mark Up	27	Rp 288,7 Miliar	-
Penggelapan	29	Rp 166,8 Miliar	-
Laporan Fiktif	24	Rp 67,3 Miliar	-
Penyalahgunaan Anggaran	43	Rp 763,3 Miliar	-
Suap	19	-	Rp 118,1 Miliar
Penyunatan / Pematangan	6	Rp 331,2 Miliar	-
Pemerasan	2	-	-
Penyalahgunaan Wewenang	25	Rp 155,2 Miliar	-
Kegiatan/Proyek Fiktif	35	Rp 62,3 Miliar	-
Pungutan Liar	55	-	--
Pencucian Uang	1	-	-
TOTAL		Rp 1,83 Triliun	Rp 118,1 Miliar

KASUS KORUPSI SEMESTER I 2017 BERDASARKAN MODUS YANG DITANGANI OLEH APH

Keterangan	APARAT PENEGAK HUKUM				Jumlah
	Kejaksaan	Kepolisian	KPK	Pusat Polisi Militer	
Mark Up	19	6	1	1	27
Penggelapan	18	11	0	0	29
Laporan Fiktif	18	6	0	0	24
Penyalahgunaan Anggaran	31	11	1	0	43
Suap	4	1	14	0	19
Penyunatan / Pematangan	2	4	0	0	6
Pemerasan	0	2	0	0	2
Penyalahgunaan Wewenang	19	2	4	0	25
Kegiatan/Proyek Fiktif	21	13	1	0	35
Pungutan Liar	3	52	0	0	55
Pencucian Uang	0	1	0	0	1
TOTAL	135	109	21	1	266

- Kejaksaan paling sering menindak kasus korupsi yang bermodus penyalahgunaan anggaran.
- Sekitar 47% kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian bermoduskan Pungutan liar. Munculnya Perpres Satgas Saber Pungli yang diteken oleh Jokowi pada 22 Oktober tahun 2016 menjadi salah satu faktor tingginya angka penegakan tipikor dalam modus pungli.
- Sebagian besar modus yang sering ditindak oleh KPK adalah suap.

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN SEMESTER I 2017 BERDASARKAN WILAYAH (5 TERATAS)



JAWA TIMUR

Jumlah Kasus 23 Kasus
Nilai Kerugian Negara
Rp 14,5 miliar



RIAU

Jumlah Kasus 19 Kasus
Nilai Kerugian Negara
Rp 211 miliar



PUSAT

Jumlah Kasus 19 Kasus
Nilai Kerugian Negara
Rp 211 miliar



JAWA BARAT

Jumlah Kasus 30 Kasus
Nilai Kerugian Negara
Rp 179 miliar



SUMATERA UTARA

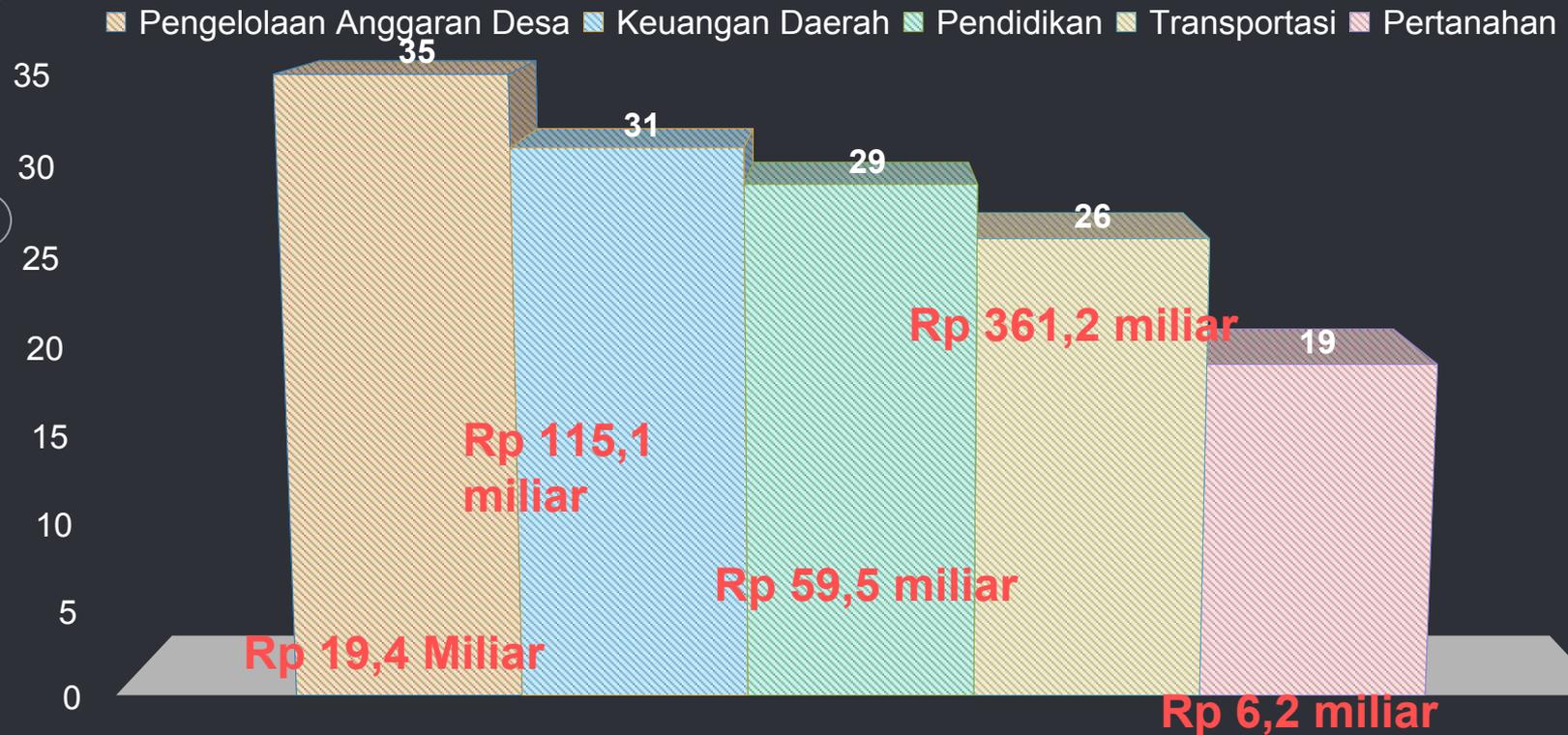
Jumlah Kasus 28 Kasus
Nilai Kerugian Negara
Rp 39 miliar

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA SEMESTER I 2017 BERDASARKAN LEMBAGA (5 TERATAS)



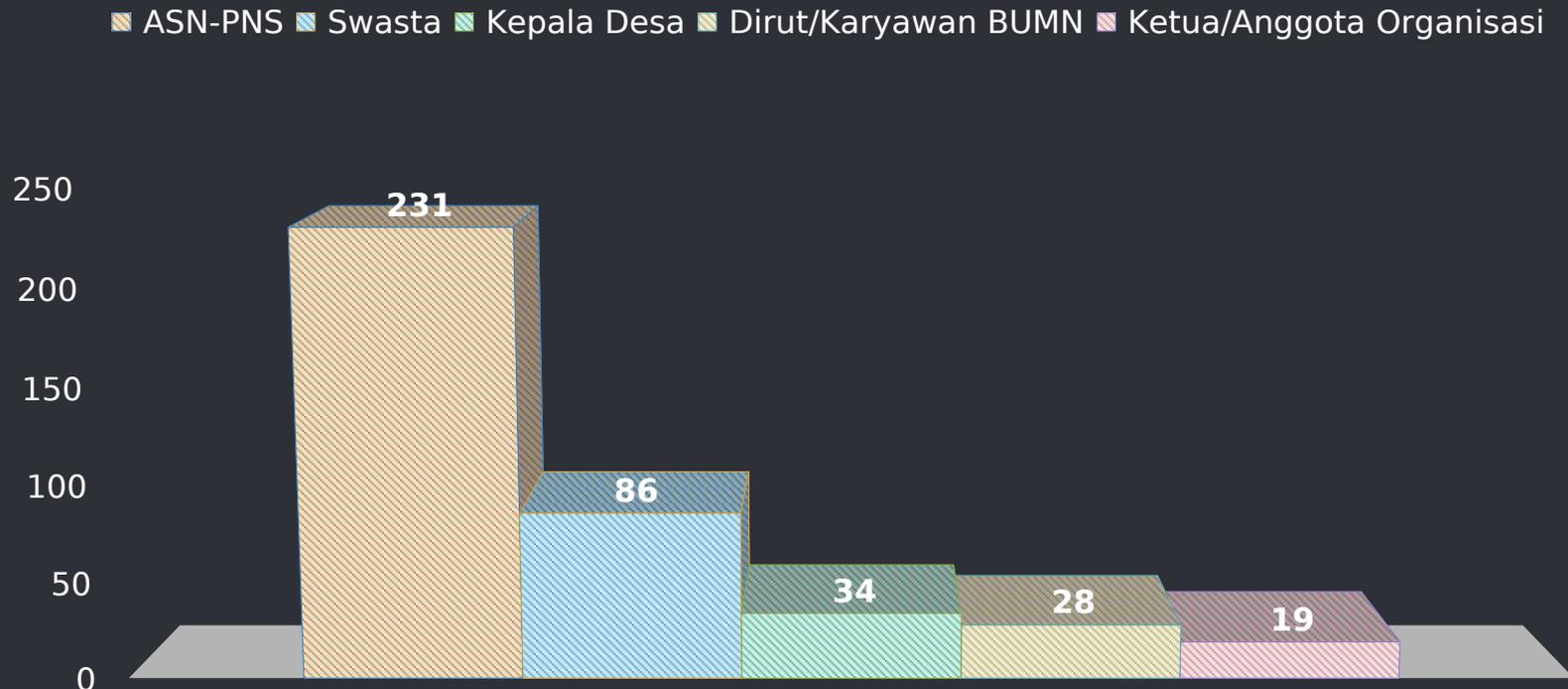
- Pemerintah Kabupaten menjadi lembaga tempat terbanyak terjadi praktik korupsi.
- Pemerintah desa menjadi lembaga terbanyak kedua terjadinya praktik korupsi.
- Maraknya penindakan yang dilakukan oleh APH di Kementerian menjadikan sinyal bahwa masih lemahnya pengelolaan anggaran yang terjadi di lembaga tersebut.

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA SEMESTER I 2017 BERDASARKAN SEKTOR (5 TERATAS)



- Sekitar 35 persen kasus korupsi terjadi bersumber dari Dana Desa.
- Besarnya anggaran desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten menjadi titik rawan untuk dikorupsi.
- Keuangan daerah menjadi sektor yang masih menjadi sasaran pelaku korupsi dalam merampok uang negara.
- Sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan transportasi menjadi sektor yang juga rentan untuk dikorupsi.

JUMLAH AKTOR YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA PADA SEMESTER I 2017 (5 TERATAS)



- Sekitar 40 persen pelaku korupsi dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (PNS). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia masih belum konsisten dibenahi oleh Pemerintahan Jokowi.
- Unsur swasta masih menjadi urutan kedua dalam kaitan pelaku korupsi yang tertangkap. Perselingkuhan antara pemerintah dan swasta masih terjadi.

KINERJA PENYIDIKAN APARAT PENEGAK HUKUM PADA SEMESTER I 2017



Jumlah Kejaksaan : 520 Kantor Kejaksaan
Kasus Korupsi : 135 Kasus korupsi
Jumlah Tersangka : 28 Tersangka
Nilai Kerugian Negara : Rp 949 Miliar
Nilai Suap : Rp 6,8 Miliar



Jumlah Kepolisian : 535 Kantor Kepolisian
Kasus Korupsi : 140 Kasus korupsi
Jumlah Tersangka : 243 Tersangka
Nilai Kerugian Negara : Rp 530 Miliar
Nilai Suap : Rp – Miliar



Kasus Korupsi : 21 Kasus korupsi
Jumlah Tersangka : 62 Tersangka
Nilai Kerugian Negara : RP 104 Miliar
Nilai Suap : Rp 111,3 Miliar



PENANGANAN KASUS KORUPSI DI KEJAKSAAN PADA SEMESTER I 2017



WILAYAH

WILAYAH	JUMLAH KASUS	JUMLAH LEMBAGA
Pulau Sumatera	46 Kasus	174 Lembaga
Pulau Jawa	24 Kasus	122 Lembaga
Pulau Kalimantan	17 Kasus	59 Lembaga
Pulau Sulawesi	17 Kasus	94 Lembaga
Pulau Bali, NTT, NTB	14 Kasus	37 Lembaga
Pulau Maluku	10 Kasus	22 Lembaga
Pulau Papua	2 Kasus	11 Lembaga
Nasional	5 Kasus	1 Lembaga

- Belum optimalnya Kejaksaan yang berada di daerah berdasarkan perbandingan kasus yang ditangani dengan jumlah lembaga.

AKTOR (3 TERBANYAK)

JABATAN	JUMLAH
ASN/PNS	116 Tersangka
Swasta	47 Tersangka
Kepala Desa	18 Tersangka

- Aktor yang ditetapkan oleh Kejaksaan selain ASN/PNS dan swasta juga menysasar Kepala Desa.

PENANGANAN KASUS KORUPSI DI KEPOLISIAN PADA SEMESTER I 2017



WILAYAH

WILAYAH	JUMLAH KASUS	JUMLAH LEMBAGA
Pulau Sumatera	34 Kasus	161 Lembaga
Pulau Jawa	32 Kasus	132 Lembaga
Pulau Kalimantan	8 Kasus	58 Lembaga
Pulau Sulawesi	15 Kasus	77 Lembaga
Pulau Bali, NTT, NTB	14 Kasus	43 Lembaga
Pulau Maluku	1 Kasus	22 Lembaga
Pulau Papua	4 Kasus	41 Lembaga
Nasional	1 Kasus	1 Lembaga

- Lembaga Kepolisian masih belum optimal dalam penanganan kasus korupsi. Jumlah kasus korupsi yang disidik sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah lembaga yang berada di daerah.

AKTOR (3 TERBANYAK)

JABATAN	JUMLAH
ASN/PNS	93 Tersangka
Swasta	26 Tersangka
Masyarakat	20 Tersangka

- Aktor yang ditetapkan oleh Kepolisian selain ASN/PNS dan swasta juga menysasar masyarakat yang juga turut terlibat dalam tindak pidana korupsi.

PENANGANAN KASUS KORUPSI DI KPK PADA SEMESTER I 2017

WILAYAH

WILAYAH	JUMLAH KASUS	JUMLAH LEMBAGA
Pulau Sumatera	4 Kasus	-
Pulau Jawa	2 Kasus	-
Pulau Kalimantan	0 Kasus	-
Pulau Sulawesi	0 Kasus	-
Pulau Bali, NTT, NTB	0 Kasus	-
Pulau Maluku	1 Kasus	-
Pulau Papua	1 Kasus	-
Nasional	13 Kasus	1 Lembaga

AKTOR (3 TERBANYAK)

JABATAN	JUMLAH
ASN/PNS	19 Tersangka
Swasta	11 Tersangka
Anggota DPRD	7 Tersangka

- o KPK selain menyoasar ASN/PNS dan swasta juga menyoasar anggota DPRD.

Kerja-kerja KPK dalam penindakan korupsi sudah sangat optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang ditangani meskipun hanya memiliki satu lembaga yang berada di pusat.

KINERJA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN MASIH BELUM OPTIMAL. MENGGINGAT BANYAKNYA JUMLAH LEMBAGA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DI DAERAH NAMUN TIDAK SEBANDING DENGAN PENANGANAN KASUS KORUPSI DI DAERAH.

KESIMPULAN

- Penyidikan kasus korupsi cenderung menurun jika melihat dari tren korupsi mulai dari semester I 2013 sampai semester I 2017. Meskipun demikian, terjadi sedikit peningkatan jumlah kasus yang ditangani pada semester I 2016 ke semester I 2017.
- Aparat Penegak Hukum (APH) pada semester I 2017 lebih banyak menangani kasus yang bermodus pungutan liar.
- Pengelolaan anggaran desa masih menjadi sektor yang rawan untuk dikorupsi. Sedikitnya ada 35 persen kasus yang berhubungan dengan Dana Desa.
- Terdapat 19 kasus korupsi yang ada penetapan tersangka baru.
- Banyaknya ASN yang tertangkap menandakan bahwa belum berhasilnya reformasi birokrasi khususnya di daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota).
- Belum optimalnya kinerja Kejaksaan dan Kepolisian dalam menangani kasus korupsi di daerah. Padahal setiap instansi APH di daerah mendapatkan anggaran yang sama setiap tahunnya.

REKOMENDASI

- Memperkuat peran Kepala Desa dan jajarannya dalam hal pengelolaan anggaran desa.
- Penting untuk mengembangkan setiap kasus korupsi yang disidik oleh APH agar actor utama dalam penyelewangan keuangan negara dapat terungkap.
- Pemerintahan Jokowi perlu untuk memprioritaskan agenda reformasi birokrasi agar birokrat yang menempati posisi-posisi strategis dapat menggunakan wewenang mengelola anggaran secara lebih baik.
- Perlu adanya sinergi antara penegak hukum dalam kaitannya pemberantasan korupsi. Pentingnya peran korsup KPK dalam hal membantu penyidikan yang dirasa sulit.
- APH jangan hanya berfokus pada kasus yang bermodus pungutan liar, namun juga penting untuk menyasar kasus-kasus besar yang melibatkan actor penting.